

**PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM
RANGKA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SOLOK
(Studi pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Solok)**

SKRIPSI

*Dijukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh :

SEPTRIA DEVITA

BP. 05 193 057



**PRORAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

ABSTRAK

SEPTRIA DEVITA (05 193 057), Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. Pembimbing I Drs.H. Rusdi Lubis, M.Si dan pembimbing II Desna Aromaticca, S.AP, M.AP. Judul skripsi "Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan di Kabupaten Solok dalam Rangka Otonomi Daerah (Studi pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupeten Solok)".

Tuntutan gerakan reformasi mengharuskan diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu dampak dari reformasi ini adalah terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Yang ditandai dengan adanya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini, mengisyaratkan kepada kita semua akan terjadi kemungkinan-kemungkinan pengembangan terhadap suatu wilayah kepada kondisi yang lebih kondusif dan demokratis sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Termasuk pula didalamnya berbagai kemungkinan dalam hal pengelolaan dan pengembangan di bidang pendidikan. Pemberlakuan Undang-undang ini menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik yang tertuang dalam undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu sebagai pelaksana desentralisasi pendidikan ini adalah Kabupaten Solok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisa, dan menginterpretasikan pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Kabupaten Solok, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, dan SMA), serta ingin mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan ini.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah desentralisasi pendidikan, yang diukur melalui 5 aspek yaitu perundang-undangan pendidikan, pengembangan kurikulum pendidikan, pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, pembiayaan proses pendidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Kabupaten Solok masih belum maksimal. Ditemukannya hasil di lapangan antara lain : program pembangunan pendidikan di Kabupaten Solok belum memperlihatkan hasil yang maksimal, kurang meratanya penyebaran dana pendidikan, masih minimnya tingkat pendidikan (kualifikasi) dan jumlah guru yang mendapat sertifikasi, serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Desentralisasi merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan (wewenang, hak, kewajiban, dan tanggung jawab) sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah otonom, sehingga daerah otonom itu dapat melakukan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam masalah-masalah pengelolaan pembangunan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pembangunan. Tujuan dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga pemerintah berkesempatan mempelajari, memahami, merespons berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat darinya.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan kepada kita semua mengenai kemungkinan-kemungkinan pengembangan suatu

wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Otonomi daerah adalah pemberian hak dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan¹. Dengan pemberian hak dan kewajiban yang sedemikian rupa, daerah mempunyai peluang yang begitu besar dalam mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya.

Pelaksanaan otonomi daerah akan mempengaruhi segala lini pemerintahan daerah yang bersangkutan, kecuali 6 hal yang tetap menjadi wewenang pemerintah pusat, antara lain :

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Hukum dan peradilan (yustisi)
5. Moneter dan fiskal
6. Agama

Berdasarkan 6 hal yang tidak menjadi wewenang pemerintah daerah tersebut, maka bidang pendidikan, sebagai bidang yang paling krusial dalam menentukan masa depan dan kualitas SDM yang dimiliki oleh suatu daerah juga akan mendapatkan pengaruh yang cukup besar. Dengan sendirinya, pelaksanaan program untuk meningkatkan mutu pendidikan di masing-masing daerah juga

Darna Setyawan Salam. Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya. Djambatan. Jakarta. 2007

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 juncto Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok yang isinya tentang tiga pilar pembangunan salah satunya menitik beratkan sektor pembangunan pendidikan, membuktikan bahwa ada perhatian pemerintah Kabupaten Solok terhadap pendidikan. Untuk itu peneliti ingin membuktikan sejauh mana jalannya pendidikan yang didesentralisasikan di Kabupaten Solok selama otonomi daerah. Berdasarkan realita yang diukur melalui 5 aspek dalam teori, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Kabupaten Solok belum maksimal. Hal ini disebabkan karena masih banyak kendala-kendala yang ditemui selama dilaksanakannya desentralisasi pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah. Adapun hasil dari aspek-aspek yang diukur dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Kabupaten Solok ini antara lain :

1. Perundang-undangan pendidikan

Masalah perundang-undangan bersumber dari 2 hal, yaitu komitmen politik dan *political will* (kemauan politik). Keduanya ini sangat penting dalam menentukan suatu kebijakan. Di Kabupaten Solok tidak ditemukannya komitmen politik untuk menetapkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan. Komitmen politik ini berdasarkan atas kebutuhan, keinginan, dan harapan rakyat dalam penyelenggaraan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku Teori

- Chan, Sam.M & Tuti T. Sam. 2006. *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Djohan, Djohermansyah. 2003. *Kebijakan Otonomi Daerah 1999*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Lelo, Gusmal Dt. Rajo. 2007. *Pendidikan Tanpa Akhir*. Padang: Padang Media
- Mudyahardjo, Redja. 2002. *"Pengantar Pendidikan"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nur, Agustiar Syah. 2001. *Peralihan Manajemen Pendidikan dari Sentralisasi ke Desentralisasi*. Jakarta
- Setyawan Salam, Dharma. 2007. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*. Jakarta: PT Djembatan
- Sirozi.M. 2005. *Politik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Yoyon Bactiar Irianto, dkk. 2008. *Manajemen Pendidikan*. Bandung : Alfabeta

Buku-buku Metodologi

- Arikuntu, Suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset
- Nasution, S. 2003. *Metodologi Research* Ed. 1 cet.6. Jakarta : Bumi Aksara
- Prof. Dr. Susiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Rohidi. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Sanapiah, Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang